

## **ANALISIS KERJASAMA BAKAMLA RI DENGAN TNI AL DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA**

Ricardo Sirait<sup>1</sup>, Edison<sup>2</sup>

Email: [ricardo123sirait@gmail.com](mailto:ricardo123sirait@gmail.com)

Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut (Seskoal)

**Abstrak:** Studi ini mengkaji kolaborasi antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menangani masalah penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara, yang terletak di antara Laut China Selatan dan Laut Natuna Selatan, merupakan zona strategis yang kaya akan biodiversitas dan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kerjasama antar-lembaga dalam mengamankan wilayah perairan ini dari aktivitas illegal fishing yang tidak hanya mengancam kedaulatan wilayah, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi maritim Indonesia.

**Kata Kunci:** Bakamla RI, Laut Natuna Utara, Illegal Fishing, Keamanan Maritim, Kerjasama Antar-lembaga

***Abstract:** This study examines the collaboration between the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla RI) and the Indonesian Navy (TNI AL) in addressing the issue of illegal fishing in the North Natuna Sea. Located between the South China Sea and the South Natuna Sea, the North Natuna Sea is a strategic zone rich in biodiversity and natural resources such as oil and gas. This research aims to assess the effectiveness of inter-agency cooperation in securing this maritime area from illegal fishing activities, which not only threaten territorial sovereignty but also the environmental sustainability and maritime economy of Indonesia.*

***Keywords:** Bakamla RI, North Natuna Sea, Illegal Fishing, Maritime Security, Inter-agency Cooperation*

### **PENDAHULUAN**

Laut Natuna Utara, yang terletak di bagian utara Kepulauan Riau, memiliki lokasi yang sangat strategis dan vital, menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia ke jalur perairan internasional. Posisi ini mengakibatkan wilayah tersebut seringkali menjadi titik panas geo-politik, terutama karena aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh negara-negara asing. Praktik ini tidak hanya mengurangi stok ikan yang menjadi sumber daya penting bagi nelayan lokal, tetapi juga berpotensi merusak habitat laut yang merupakan bagian dari ekosistem maritim. Kegiatan ilegal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi maritim di kawasan tersebut.

Sebagai respons, Pemerintah Indonesia, melalui Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) dan TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), telah meningkatkan upaya penegakan hukum dan keamanan maritim. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan frekuensi patroli maritim, penggunaan teknologi surveilans yang lebih canggih, dan kerja sama internasional yang lebih intensif dengan negara-negara tetangga untuk memerangi praktik penangkapan ikan yang tidak sah. Dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, Indonesia bertujuan untuk tidak hanya melindungi kekayaan alamnya tetapi juga mengamankan kedaulatan nasional di perairan strategis ini.

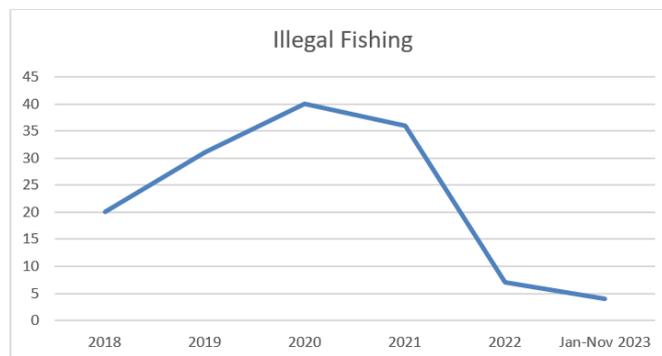
## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan operasional Bakamla RI dan TNI AL, serta wawancara dengan stakeholder terkait di wilayah Natuna. Analisis difokuskan pada strategi patroli bersama, kebijakan penegakan hukum, dan kerjasama antar lembaga dalam menangani insiden di laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan studi ini mengindikasikan beberapa poin kunci mengenai penegakan hukum maritim di Laut Natuna Utara: pertama, walaupun terdapat peningkatan sinergi yang memperbaiki efektivitas pengawasan, masih ada kekurangan signifikan dalam sumber daya seperti kapal patroli yang memadai dan teknologi pemantauan modern, yang dapat menghambat kegiatan penegakan hukum di area yang luas dan terisolasi. Kedua, pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga, termasuk Bakamla RI dan TNI AL bersama dengan agensi lain yang terlibat, untuk memastikan kelancaran operasi dan penggunaan sumber daya yang optimal. Ketiga, seringkali kegiatan illegal fishing yang melibatkan kapal dari negara lain memerlukan kerjasama yang lebih intensif dan koordinasi dengan negara-negara tetangga

Dalam upaya memperkuat penegakan hukum, telah diterapkan beberapa strategi seperti peningkatan frekuensi patroli yang dilakukan oleh Bakamla RI dan TNI AL, baik secara individu maupun bersama, untuk memperluas cakupan pengawasan dan deteksi dini kegiatan illegal. Selain itu, pelatihan bersama secara rutin diadakan untuk mengasah keahlian personel dalam operasi maritim, serta peningkatan pertukaran informasi intelijen maritim untuk membantu perencanaan strategi patroli dan operasi yang lebih efektif.



Gambar 1 Grafik penurunan illegal fishing tahun 2023 setelah patroli bersama

## KESIMPULAN

Kerjasama Bakamla RI dengan TNI AL telah memperkuat upaya penegakan hukum di Laut Natuna Utara, tetapi peningkatan kapasitas dan sumber daya masih sangat diperlukan untuk mengatasi illegal fishing secara efektif. Penelitian ini menyarankan penguatan kebijakan hukum dan kerjasama regional lebih lanjut untuk mengatasi masalah lintas negara ini. Efektivitas patroli bersama dapat ditingkatkan melalui investasi dalam teknologi pengawasan dan peningkatan koordinasi dengan agen penegak hukum dan komunitas lokal untuk menciptakan strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengamankan keamanan maritim Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sudiro, Pratondo Ario Seno, Konsep Multihelix Kemandirian Bakamla RI Dalam Pengaduan Kapal Patroli. Defendonesia, 2022.
- Rohana, Undang, Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla RI dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan terhadap Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2022
- PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.